#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan terdepan memiliki peran strategis dalam manajemen program penanggulangan *stunting*. Menurut Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas bertanggung jawab dalam melaksanakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) yang mencakup pencegahan, promosi, pengobatan, dan rehabilitasi.

Manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian yang didalamnya mencakup perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Manajemen dilihat sebagai ilmu yang mengajarkan proses mendapatkan tujuan dalam organisasi, sebagai usaha bersama dengan beberapa orang dalam organisasi tersebut (Widodo, A. S., dkk 2020).

Stunting adalah kondisi kurang gizi kronis yang terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, kondisi ini bisa menimbulkan dampak di masa yang akan datang, yakni mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Stunting merujuk pada status gizi pada anak berdasarkan indeks Tinggi Badan Per Umur (TB/U), yang menunjukkan keadaan tubuh yang pendek atau sangat pendek hasil dari gagal pertumbuhan. Masalah stunting uumnya dialami oleh anak di bawah lima tahun yang mengalami kurang gizi sejak di dalam

kandungan hingga masa awal setelah kelahiran (Karmila, T., & Hasnah, F 2024).

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 24,4%, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan mencapai 21,6%. Penurunan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya penanggulangan *stunting*, pemerintah menargetkan penurunan lebih lanjut pada tahun 2024 yaitu sebesar 14%.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah menetapkan percepatan penurunan *stunting* sebagai salah satu prioritas nasional. Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, RPJMN mengamanatkan integrasi program penanggulangan *stunting* melalui pendekatan multisektor, melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Sosial. Kebijakan ini menekankan pentingnya intervensi spesifik (seperti pemberian makanan tambahan dan suplementasi gizi) dan intervensi sensitif (seperti perbaikan sanitasi, akses air bersih, dan peningkatan ekonomi keluarga).

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada Juli 2023, prevalensi *stunting* di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir (2020,2021,2022) di Jawa Barat adalah 2% pertahun. Pada tahun 2022 angka stunting di Jawa Barat sebesar 20,2% dan mengalami penurunan sebesar 4,3% dibanding tahun 2021. Nilai rata-rata balita *stunting* tiap tahun sebesar

241,93 dalam 9 tahun terakhir. Sedangkan di Kota Tasikmalaya prevalensi balita *stunting* pada tahun 2022 sebesar 12,65%.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya 2024

Gambar 1.1 Diagram Data Stunting Kota Tasikmalaya

Berdasarkan diagram diatas data persentase *stunting* di Kota Tasikmalaya pada tahun 2024, Kawalu menjadi wilayah dengan angka *stunting* tertinggi, yaitu mencapai 21,72%, menunjukkan bahwa masalah stunting di daerah ini memerlukan perhatian serius. Karang Anyar dan Kersanagara juga mencatat angka *stunting* yang cukup tinggi, masing-masing sebesar 17,05% dan 16,05%. Di sisi lain, Sambongpari mencatat angka stunting terendah, yaitu hanya 3,21%, yang menandakan upaya penanganan stunting di wilayah ini berjalan dengan baik. Beberapa wilayah lain seperti Cihideung dan Cipedes juga menunjukkan angka *stunting* yang rendah, yaitu 5,45% dan 6,37%. Beberapa wilayah seperti Tamansari, Sangkali, dan Bungursari memiliki angka stunting yang berada di tingkat sedang, yaitu 10,95%, 11,35%, dan 11,87%. Sementara itu, Sukalaksana dan Indihiang mencatat angka *stunting* yang lebih tinggi dari rata-rata, yaitu

13,51% dan 12,97%. Purbaratu dan Kahuripan juga termasuk wilayah yang perlu diperhatikan, dengan angka *stunting* masing-masing sebesar 12,62% dan 12,01%. Di wilayah seperti Tawang, Mangkubumi, dan Parakanyasag, angka stunting terbilang lebih rendah, yaitu 8,04%, 7,62%, dan 8,49%.

Berdasarkan data *stunting* di Puskesmas Kawalu pada tahun 2024, tercatat total stunting sebanyak 475 kasus, di mana wilayah kerja puskesmas terbagi menjadi 3 wilayah kerja yaitu, Kelurahan Karsamenak mencatat kasus *stunting* tertinggi, yaitu 240 kasus, diikuti oleh Kelurahan Tandala dengan 175 kasus, dan Kelurahan Talagasari dengan 60 kasus.

Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan di Puskesmas Kawalu, ditemukan bahwa tenaga kesehatan lebih memprioritaskan program-program yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Hal ini mengakibatkan program penanggulangan *stunting* tidak mendapatkan perhatian yang memadai, kondisi ini terjadi akibat kurangnya koordinasi antar program dan terbatasnya pelatihan khusus mengenai penanggulangan stunting. Tenaga kesehatan sering kali belum memahami secara mendalam intervensi sensitif yang diperlukan untuk mencegah stunting, seperti perbaikan sanitasi, peningkatan ekonomi keluarga, dan edukasi pola asuh yang baik. Sebagai akibatnya, intervensi yang dilakukan lebih bersifat spesifik, seperti pemberian makanan tambahan (PMT), tanpa mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang juga memiliki peran penting dalam penanggulangan *stunting*.

Menurut Anisa et al., (2024) manajemen program penanggulangan *stunting* dapat dianalisis melalui empat tahapan utama: perencanaan (*planning*),

pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), pengawasan (controlling), dan evaluasi (evaluating). Menurut Nalle,et.al. (2024) pemahaman program yang terstruktur memungkinkan Puskesmas untuk meningkatkan penanggulangan stunting dengan mengidentifikasi kendala seperti pola asuh tradisional atau kurangnya kesadaran masyarakat, memberikan solusi yang tepat, sehingga program dapat berjalan lebih efektif dan mencapai target yang diharapkan.

Menurut penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa manajemen program penanggulangan *stunting* yang tepat dapat menurunkan angka *stunting*. Untuk mempermudah penurunan stunting, diperlukan peningkatan dalam hal koordinasi dan keterpaduan antar lintas sektor, pelatihan dan pembinaan kader serta masyarakat, penyebaran informasi yang merata dan efektif, peningkatan kesadaran dan literasi masyarakat, pemanfaatan teknologi dan media sosial (Nalle et al., 2024 dan Anisa et al., 2024). Sejalan dengan temuan ini dari kedua jurnal diatas mencatat bahwa manajemen program penanggulangan *stunting* telah berhasil meningkatkan manajemen program penanggulangan stunting, namun tantangan dalam kurangnya koordinasi, pelatihan khusus, fokus yang berlebihan pada intervensi spesifik, pemahaman yang terbatas tentang stunting, serta kurangnya perhatian pada intervensi sensitif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen program penanggulangan stunting di Puskesmas Kawalu Kota Tasikmalaya dengan pendekatan POACE, sehingga diharapkan dapat mendukung upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di wilayah tersebut.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini adalah "Bagaimana Manajemen Program Penanggulangan Stunting di Puskesmas Kawalu Kota Tasikmalaya?"

# C. Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen program penanggulangan *stunting* di Puskesmas Kawalu Kota Tasikmalaya.

# 2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis proses perencanaan (planning) program penanggulangan stunting yang meliputi identifikasi masalah, penetapan tujuan, dan penyusunan kegiatan di Puskesmas Kawalu Kota Tasikmalaya.
- b. Mengevaluasi tahapan pengorganisasian (organizing) program penanggulangan stunting, termasuk pembagian tugas, pelibatan lintas sektor, dan mekanisme koordinasi antarpetugas di Puskesmas Kawalu Kota Tasikmalaya.
- c. Mengidentifikasi pelaksanaan (actuating) program penanggulangan stunting berdasarkan intervensi spesifik dan sensitif yang dilakukan petugas di lapangan.

- d. Menilai efektivitas tahapan pengawasan (controlling) program penanggulangan stunting melalui monitoring kegiatan dan tindak lanjut evaluasi internal di Puskesmas Kawalu Kota Tasikmalaya.
- e. Memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program penanggulangan stunting di Puskesmas Kawalu Kota Tasikmalaya.

# D. Ruang Lingkup Penelitian

### 1. Ruang Lingkup Masalah

Permasalahan yang akan diteliti mengenai analisis manajemen program penanggulangan *stunting* di Puskesmas Kawalu kota Tasikmalaya.

# 2. Ruang Lingkup Metode

Penelitian ini adalah pendekatan deskriptif.

### 3. Ruang Lingkup Keilmuan

Bidang ilmu yang diterapkan dalam penelitian ini adalah lingkup Kesehatan Masyarakat khususnya di bidang Administrasi Kebijakan Kesehatan.

## 4. Ruang Lingkup Tempat

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kawalu kota Tasikmalaya

## 5. Ruang Lingkup Sasaran

Sasaran dalam penelitian ini adalah kepala puskesmas, pemegang program gizi, petugas lapangan (bidan), ibu balita, dan kader posyandu.

# 6. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2025

#### E. Manfaat Penelitian

# 1. Bagi Peneliti

Memperluas wawasan, pengetahuan dan mengembangkan kemampuan dalam mengaplikasikan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan dalam lingkup Administrasi dan Kebijakan Kesehatan.

### 2. Bagi Puskesmas Kawalu Kota Tasikmalaya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pihak Puskesmas Kawalu dalam meningkatkan kualitas manajemen program penanggulangan stunting, khususnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program. Informasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi lintas program dan meningkatkan efektivitas intervensi spesifik dan sensitif yang telah dilakukan..

### 3. Bagi Kelurahan di Wilayah Kerja Puskesmas Kawalu

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program stunting di tingkat puskesmas sebagai unit pelaksana teknis. Dinas Kesehatan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk merancang kebijakan dan strategi pendampingan yang lebih tepat sasaran, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program penanggulangan stunting di wilayah kerja..

## 4. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pihak kelurahan dan masyarakat tentang pentingnya keterlibatan aktif dalam mendukung program penanggulangan stunting. Melalui informasi ini, kelurahan dapat memperkuat sinergi dengan puskesmas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, sedangkan masyarakat dapat lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan posyandu, pemantauan pertumbuhan anak, dan praktik pengasuhan yang sehat.

## 5. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan dasar perbandingan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji program penanggulangan stunting dengan pendekatan manajemen, khususnya menggunakan model POACE. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi pijakan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dengan lingkup wilayah dan pendekatan yang berbeda.